

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI

Maryanto¹

**Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci,
Sungai Penuh, Indonesia**

E-mail: maryantoyanto1974@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Effect of Regional Financial Management and Good Governance on Government Performance in Kerinci Regency simultaneously and partially. The population of this study is employees at the Kerinci Regency, using the sampling technique that is purposive sampling. Respondents in the study are from the parts or devices related to this study. The number of respondents in this study amounted to 75 respondents. Data was collected by a questionnaire that had been tested for validity and reliability.

The data analysis technique used is multiple regression. The results of the study show that Regional Financial Management has an effect on Government Performance in Kerinci Regency, this is evidenced by t count $>$ t table ($3,670 > 1,99346$). Good Governance has an effect on Government Performance in Kerinci Regency, this is proved by t count $>$ t table ($6,072 > 1,99346$). Simultaneously there is a significant influence between Regional Financial Management and Good Governance on Government Performance in Kerinci Regency that can be proven by F count $>$ F table ($37,508 > 3,12$). The magnitude of the influence of Regional Financial Management and Good Governance on Government Performance in Kerinci Regency was 51%. While the remaining 49% is explained by other causes that were not examined in this study.

Keywords:

Regional Financial Management, Good Governance, Government Performance

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan wewenang yang lebih besar bagi pemerintah

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang diterima pemerintah daerah salah satunya adalah menyusun sendiri kebijakan daerah, yang ditujukan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu adanya perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terbaru adalah UU No. 23 Tahun 2014.

Kemudian serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya

tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Lahirnya otonomi daerah menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula adalah sentralisasi lalu menjadi desentralisasi. Pada era otonomi daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, sehingga dalam hal mengatasi permasalahan daerah, wewenang otonomi daerah sangat diprioritaskan.

Penilaian kinerja pada pemerintah sangat penting dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengevaluasi kinerja periode yang lalu, agar dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan strategi pemerintah untuk periode berikutnya. Kemudian menurut Mardiasmo (2009) penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga hal, yaitu: membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban organisasi publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk menilai prestasi pimpinan dan unit organisasi yang dipimpinya, dan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Ditambahkan lagi oleh Mardiasmo (2009) bahwa pengukuran kinerja adalah suatu sasaran dan proses yang sistematis

untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi serta menentukan efisiensi dan efektifitas tugas-tugas pemerintah daerah serta pencapaian sasaran.

Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya. Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kerinci yaitu mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian diperjelas dan dijabarkan kembali dalam Peraturan Bupati Kerinci No 24 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci. Untuk *good governance* atau Tata Kelola Pemerintah itu sendiri, di pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci tahun 2018 yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Peraihan WTP ini sangat berhubungan dengan *good governance* atau tata kelola pemerintahan karena dalam penghargaan ini disebutkan diatas memperoleh prestasi akuntabilitas kinerja, dimana akuntabilitas adalah merupakan salah satu bagian atau indikator dari *good governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara parsial dan simultan.

Maka berdasarkan latar belakang dan fenomena dan hal-hal yang dijelaskan diatas maka peneliti mengambil judul yaitu “ Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci “.

Landasan Teori

Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai pemerintah dalam periode tertentu. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2006) menyatakan Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut.

1. *Good Governance*

Good governance diartikan sebagai suatu proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi) di suatu negara atau daerah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam penggunaan segala sumber daya, baik alam, manusia dan keuangan, dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas publik dan hak-hak asasi manusia.

2. Pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan APBD didasari dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sesuai dengan kemampuan daerah dan kebutuhan masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

3. Sistem akuntansi keuangan daerah.

Pengertian dari Sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitasentitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi). Secara eksplisit, penggunaan informasi akuntansi bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik dilaksanakan para penyusun dan pelaksana program dan mentaati pencapaian tujuan dengan batasan tingkat pendanaan yang ditetapkan.

H1: Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci

H2: *Good governance* berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci

H3: Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good governance* secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci

Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan suatu ukuran prestasi atau hasil dalam mengelola dan menjalankan suatu organisasi dimana berhubungan dengan segala hal yang akan, sedang dan telah dilakukan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja pada pemerintah sangat penting dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengevaluasi kinerja periode yang lalu, agar dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan strategi pemerintah untuk periode berikutnya. Menurut Mahsun (2006) indikator kinerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Indikator Masukan
2. Indikator proses
3. Indikator keluaran
4. Indikator hasil
5. Indikator manfaat
6. Impacts

Adapun manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2009) antara lain memberikan pemahaman, memberikan arah, untuk memonitor dan mengevaluasi, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan, membantu mengidentifikasi kepuasan pelanggan, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya, tujuan pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2010) adalah untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai, memperbaiki kinerja periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment, memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Mendagri, 2007).

Metodologi

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Alasan dipilih objeknya adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah apakah telah sesuai aturan yang berlaku dan tata kelola pemerintah (*good governance*) apakah telah sesuai atau baik. Kemudian kedua variabel tersebut nantinya dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

Adapun variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu : Variabel Bebas (Independent Variable) dan Variabel Terikat (Dependent Variable). Variabel Independen yaitu variabel yang memengaruhi atau menjadi sebuah perubahan atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono (2014:59). Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen adalah Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance. Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono (2014:59). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Dalam proses penelitian ini di mulai dari peneliti mengajukan pengujian instrumen penelitian, menyebarkan kuesioner, hingga analisis data. Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai identitas responden yang meliputi jenis kelamin, pekerjaan, dan usia. Dan hasil dari penyebaran kuesioner tersebut kemudian akan diolah dengan menggunakan alat bantu statistika yaitu SPSS.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kerinci. Penelitian ini hanya dilakukan pada Bagian terkait yang bisa mewakili penelitian ini. Dan teknik pengambilan sampelnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubag Keuangan, Kasubag Program, dan Staf Akuntansi/ Keuangan yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kerinci. Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa Kasubag Keuangan, Kasubag Program, dan Staf Akuntansi/ Keuangan merupakan pihak yang terkait langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Responden dalam penelitian ini berjumlah 75 orang dari 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masing-masing terdiri dari ada 3 responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka,

atau data yang diangkakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber ahli dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original tanpa melalui perantara, dan juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung yang dibagikan kepada bagian-bagian yang terkait dalam penelitian ini yang ditentukan berdasarkan penilaian peneliti. Dan data sekunder yang diperoleh dari hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Library Research (Penelitian Pustaka) yaitu suatu teknik untuk mendapatkan data teoritis atau data sekunder dalam penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen resmi, catatan dan transkrip, yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.
2. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian langsung kelapangan dalam rangka mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa, Daftar Pertanyaan (Quesioner) yaitu metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditujukan kepada para responden di objek penelitian.

Definisi Operasional

1. Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator pengelolaan keuangan adalah: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan.
2. *Good Governance*
Variabel ini diukur berdasarkan: Partisipasi, Kepastian Hukum (*Rule Of Law*), Transparansi, Tanggung Jawab (*Responsiveness*), Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), Berkeadilan (*Equity*), Efektifitas dan efisien, Akuntabilitas, Visi Strategis (*Strategic Vision*).
3. Kinerja Pemerintah

Indikator Masukan (Input), Indikator Proses (Process), Indikator Keluaran, Indikator Hasil, Indikator Manfaat, Indikator Dampak.

Instrumen Penelitian

Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan atau tidak mendukung skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Apabila jawaban Sangat Setuju. Diberi nilai 5
- b. Apabila jawaban Setuju. Diberi nilai 4
- c. Apabila jawaban Cukup Setuju. Diberi nilai 3
- d. Apabila jawaban Tidak Setuju. Diberi nilai
- e. Apabila jawaban Sangat Tidak Setuju. Diberi nilai 1

Hasil dan Pembahasan

Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui persamaan analisis regresi linier berganda dari pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,968	8,091		,243	,808
Pengelolaan_Keuangan_Daerah	,295	,081	,323	3,670	,000
Good_Governance	,439	,072	,534	6,072	,000

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemerintah

Dari tabel 1 di atas dapat digambarkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 1,968 + 0,295 X_1 + 0,439 X_2$$

Dengan penjelasan dari persamaan di atas adalah:

Nilai dari a = 1,968 artinya artinya jika variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* dianggap 0 (nol) atau tidak ada maka Kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Kerinci adalah sebesar 1,968. Nilai dari $b_1 = + 0,295$ artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari Pengelolaan Keuangan Daerah adalah positif, semakin baik Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terjadi peningkatan dari Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Nilai dari $b_2 = + 0,439$ artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari *Good Governance* adalah positif, semakin baik *Good Governance*, maka terjadi peningkatan dari Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, maka dapat dijelaskan pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,714 ^a	,510	,497	7,49010

a. Predictors: (Constant), Good_Governance, Pengelolaan_Keuangan_Daerah

R Square dapat disebut Koefisien Determinasi yang di dalam hal ini berarti besarnya pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci sebesar 51%. Sedangkan sisanya (100% - 51%), yaitu 49% dijelaskan oleh faktor penyebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

1. Uji t

Untuk menguji signifikan pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Berdasarkan pada tabel 1 di atas dan dengan membandingkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya, terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas (Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance*) terhadap variabel dependen (Kinerja

Pemerintah Daerah) Dengan $t_{hitung} = 1,99346$. Sehingga dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,670 > 1,99346$) maka H_0 di tolak dan H_a di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
2. *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,072 > 1,99346$) maka H_0 di tolak dan H_a di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

2. Uji F

Untuk menguji signifikan pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci secara simultan dengan menggunakan uji F. sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Ringkasan Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4208,475	2	2104,238	37,508	,000 ^b
Residual	4039,312	72	56,102		
Total	8247,787	74			

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Good_Governance, Pengelolaan_Keuangan_Daerah

Dengan membandingkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya, terdapat pengaruh secara simultan antara Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Dengan $F_{hitung} = 37,508$. Sehingga dapat dianalisis Berdasarkan tabel 3 dari uji ANOVA atau F tes ternyata didapat $F_{hitung} = 37,508$: dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($37,508 > 3,12$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci

Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Putra, Erlina dan Sari (2016). *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Azlina dan Amelia (2014). Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Jayanti.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, *good governance* berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, dan besarnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan *good governance* terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci adalah sebesar 51%. Sedangkan sisanya yaitu 49% dijelaskan oleh faktor penyebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Peneliti menyarankan yaitu untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci agar bersama-sama meningkatkan konsistensi dalam penerapan *good governance*, pengelolaan keuangan daerah, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat terlaksana secara lebih baik dan optimal agar tidak menimbulkan kerugian pada negara. Hendaknya setelah menganalisa peraturan mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maka perlu ditinjau kembali, sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih baik. Dalam pengukuran kinerja sebaiknya menggunakan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) daerah sehingga mencerminkan secara langsung kinerja pemerintah.

Daftar Referensi

Arikunto, S. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra, (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Erlina. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi : 2. USU Press. Medan.
- Ghozali, Imam., 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Ikhsan, Arfan dan Ishak Muhammad. 2008. *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi. 2011
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.

Ridwan.2004. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2004. Metode Penelitian. Bandung. Alfabeta

Soleh, Chabib. Sripto. 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Focus Media.

Usman dan Lukman Pakaya.2014.Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten None Bolango. Jurnal Akuntansi.

Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers

Wiranto, Tatang. (2012). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik.(Online). (diakses tanggal 6 Maret 2019). Tersedia di World